

PERBANDINGAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA PRA DAN PASCA REFORMASI

Nama : Refiana Enindya D. S.

Kelas : XI RPL

Presensi : 31

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin, menyampaikan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Di Indonesia, penerapan demokrasi telah mengalami perubahan besar antara masa pra reformasi dan pasca reformasi.

Sebelum reformasi, pelaksanaan demokrasi cenderung tertutup, kekuasaan terpusat pada pemerintah, dan kebebasan rakyat sangat terbatas. Namun setelah reformasi 1998, demokrasi berkembang menjadi lebih terbuka, transparan, serta partisipatif.

Perubahan ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, pola rekrutmen politik, pelaksanaan pemilu, dan pemenuhan hak-hak rakyat.

DEMOKRASI PRA REFORMASI

Pada masa pra reformasi, terutama di era Orde Baru (1966–1998), demokrasi dijalankan secara formal tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi sejati. Pemerintah memegang kendali penuh atas politik, media, dan lembaga negara.

Ciri-cirinya antara lain:

- Kekuasaan presiden sangat besar dan sulit dikontrol.
- Pemilu diadakan, tetapi hasilnya hampir selalu dimenangkan oleh partai pemerintah.
- Media massa dan kebebasan berpendapat diawasi ketat.
- Partisipasi rakyat dalam politik sangat terbatas.

Walaupun stabil secara politik dan ekonomi, masa ini dianggap kurang demokratis karena rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka.

DEMOKRASI PASCA REFORMASI

Setelah terjadinya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki era baru demokrasi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperkuat lembaga-lembaga negara dan membatasi kekuasaan presiden.

Ciri-ciri masa pascareformasi antara lain:

- Pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
- Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin undang-undang.
- Banyak partai politik baru bermunculan.
- Pemerintah lebih transparan dan dapat diawasi oleh publik.
- Lembaga-lembaga independen seperti KPK, BPK, dan Komnas HAM berperan penting dalam menjaga keadilan dan akuntabilitas.

Meskipun masih ada tantangan seperti korupsi dan politik uang, demokrasi pascareformasi menjadi lebih sehat dan berpihak kepada rakyat.

PERBANDINGAN BERDASARKAN ASPEK DEMOKRASI

❖ Akuntabilitas

Pada masa pra reformasi, akuntabilitas pemerintahan masih sangat rendah. Pemerintah sulit dikritik dan jarang memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat. Lembaga pengawasan seperti DPR tidak berfungsi optimal karena lebih banyak mendukung kebijakan pemerintah.

Setelah reformasi, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dibentuk lembaga-lembaga independen seperti KPK, BPK, dan Ombudsman yang berperan mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, rakyat dapat dengan bebas mengkritik dan menilai kinerja pejabat melalui media dan organisasi masyarakat.

❖ Rotasi Kekuasaan

Sebelum reformasi, rotasi kekuasaan hampir tidak terjadi. Presiden Soeharto memimpin lebih dari tiga dekade, dan pergantian kepemimpinan sulit dilakukan karena sistem politik yang tertutup.

Setelah reformasi, rotasi kekuasaan berlangsung lebih demokratis. Presiden hanya boleh menjabat selama dua periode sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen. Pergantian kepemimpinan dapat dilakukan secara damai melalui pemilu langsung, sehingga kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu orang.

❖ Rotasi Rekrutmen Politik

Pada masa pra reformasi, pola rekrutmen politik bersifat tertutup dan dikendalikan pemerintah. Partai politik dibatasi hanya tiga (Golkar, PPP, dan PDI), dan banyak pejabat dipilih berdasarkan loyalitas, bukan kemampuan.

Pasca reformasi, sistem politik menjadi lebih terbuka. Muncul banyak partai politik baru, dan setiap warga negara berhak ikut serta dalam proses politik. Rekrutmen calon pemimpin dilakukan lebih terbuka, meskipun masih menghadapi tantangan seperti praktik nepotisme dan politik uang.

❖ Pelaksanaan Pemilu

Sebelum reformasi, pemilu hanyalah formalitas. Hasil pemilihan selalu berpihak pada partai pemerintah karena tidak ada pengawasan yang kuat. Rakyat tidak benar-benar bebas dalam menentukan pilihannya.

Sesudah reformasi, pemilu dijalankan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pemilu diawasi oleh lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih tanpa tekanan dari pihak manapun.

❖ Pemenuhan Hak-Hak Rakyat

Masa pra reformasi ditandai dengan pembatasan kebebasan rakyat. Pers diawasi, organisasi masyarakat dibatasi, dan banyak aktivis ditangkap karena menyuarakan kritik.

Setelah reformasi, hak-hak rakyat lebih dijamin. Kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah juga memperkuat perlindungan HAM melalui lembaga seperti Komnas HAM dan menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik agar rakyat dapat mengakses informasi dari pemerintah.

KESIMPULAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa pra reformasi ke pascareformasi menunjukkan perubahan besar menuju sistem yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Jika sebelumnya kekuasaan terpusat dan rakyat sulit mengawasi pemerintah, kini rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Demokrasi pascareformasi berhasil memperkuat akuntabilitas, menjamin rotasi kekuasaan yang sehat, membuka rekrutmen politik, menyelenggarakan pemilu yang jujur, serta memenuhi hak-hak dasar rakyat.

Meski masih menghadapi tantangan seperti politik uang dan korupsi, arah perkembangan demokrasi Indonesia terus menuju kematangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Modul PPKn Kelas XI, Kemendikbud
- Kompas (2024), *“Perjalanan Demokrasi Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi”*
- CNN Indonesia (2023), *“Evaluasi Dua Dekade Demokrasi di Indonesia”*